



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188 /025/ 441.131 / 2012

NOMOR : 170 /09 / 441.200 / 2012

**TENTANG**  
**PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)**  
**TAHUN 2012**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Drs.KH.KHOLILURRAHMAN,SH,MSI** : **BUPATI PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten PAMEKASAN yang beralamat Jalan Pamong Praja nomor 01 Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. a. **Drs. MOH. KHALIL ASY'ARI** : **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

b. **H. MOH. SAHRAWI, BA.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

c. **H. M.MUHDLAR ABDULLAH,SH,MM** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

d. **KHAIRUL KALAM,S.Sos.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten 107 - Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan no 13 Tahun 2010 tentang Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2011.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyepakati dan/atau menyetujui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2012 memuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah, baik dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, yang akan dibahas pada tahun 2012;

- (2) Daftar Usulan Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Judul Rancangan Peraturan Daerah yang baku atau tetap, bisa disesuaikan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- (4) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila substansinya ada kesamaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang lain, maka bisa dijadikan satu Judul Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2012 diupayakan dibahas dan ditetapkan berdasarkan urutan skala prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah Tahun 2012.

#### Pasal 3

Jika Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah tidak dibahas atau tidak selesai dibahas pada tahun 2012, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diprioritaskan masuk dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2013.

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Pamekasan  
pada tanggal : 9 Januari 2012

**PIHAK KESATU  
BUPATI PAMEKASAN**



Drs. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, MSi.

**PIHAK KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KETUA,**



Drs. MOH. KHALIL ASY'ARI

**WAKIL KETUA,**



H. MOH. SAHRAWI, BA.

**WAKIL KETUA,**



H. M. MUHDLAR ABDULLAH, SH. MM.

**WAKIL KETUA,**



KHAIROL KALAM, S.Sos.

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ /441.131/2012

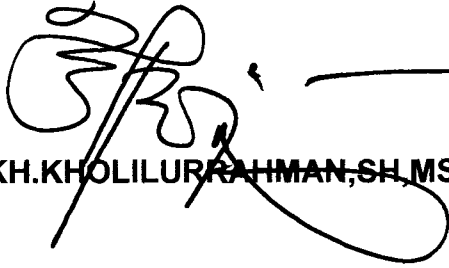
NOMOR : 170/ /441.200/2012


TANGGAL : 9 JANUARI 2012

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PENGUSUL</b>
1	APBD TA. 2012	PIHAK KESATU
2	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	PIHAK KESATU
3	Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja	PIHAK KEDUA
4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	PIHAK KESATU
5	Pelestarian Budaya Asli Pamekasan	PIHAK KEDUA
6	Pengaturan Hiburan Pentas Seni dan Budaya	PIHAK KEDUA
7	Perlindungan Tenaga Kerja	PIHAK KEDUA
8	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura	PIHAK KEDUA
9	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	PIHAK KEDUA
10	Pembentukan Peraturan Daerah	PIHAK KEDUA
11	Perubahan Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	PIHAK KEDUA
12	Penataan Pasar Modern dan Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional	PIHAK KEDUA
13	Perubahan Perda No. 10 Th. 2004 tentang PDAM	PIHAK KEDUA
14	Ijin Pendirian, Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Tower	PIHAK KEDUA
15	CSR (Pertanggungjawaban Sosial)	PIHAK KEDUA
16	Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Permukiman dari Pengembang ke Pemerintah Daerah	PIHAK KEDUA
17	Ijin Praktek dan Tempat Pelayanan Kesehatan	PIHAK KEDUA
18	Pelayanan Kesehatan	PIHAK KEDUA
19	Perubahan Perda No. 9 Tahun 1999 tentang Ijin HO	PIHAK KEDUA

20	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ➤ Pemecahan Dinas Pekerjaan Umum - Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga - Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan - Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan	PIHAK KESATU
21	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ➤ Pemecahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset - Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset	PIHAK KESATU
22	Penyusunan Peraturan Desa	PIHAK KESATU
23	Tata Kelola Hotel dan Tempat Penginapan (Kos)	PIHAK KEDUA
24	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	PIHAK KESATU
25	Pengelolaan Sumber Daya Air	PIHAK KEDUA
26	Tata Kelola Bahan Pupuk Organik	PIHAK KEDUA
27	Penyertaan Modal pada PDAM	PIHAK KESATU

**PIHAK KESATU**  
**BUPATI PAMEKASAN,**  
  
**Drs. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, MSi.**

**PIHAK KEDUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
  
**KETUA**  
**Drs. MOH. KHALILASY'ARI**

**WAKIL KETUA,**

**H.M. MUHDLAR ABDULLAH, SH, MM.**

**WAKIL KETUA,**

**H. MOH. SAHRAWI, BA.**

**WAKIL KETUA,**

**KHAIRUL KALAM, S.Sos.**